



DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN/KOTA
TA .2019**

PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN



KLINIK.1

LATAR BELAKANG

1. **Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 15** huruf e adalah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota
2. **Kabupaten/kota telah melakukan penyusunan RP3KP pada Tahun 2018** , dan perlu penyesuaian dengan pedoman penyusunan RP3KP yang akan disahkan



TUJUAN dan SASARAN

TERSUSUNYA DOKUMEN TEKNIS, NASKAH AKADEMIK, DAN RANPERDA SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

SASARAN

1. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN TEKNIS, NASKAH AKADEMIK, DAN RANPERDA YANG TELAH DISUSUN
2. Melakukan Pendampingan penyusunan DOKUMEN TEKNIS, NASKAH AKADEMIK, DAN RANPERDA YANG TELAH DISUSUN

TUJUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2035
8. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2019.



Kondisi Eksisting Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Provinsi/Kota/Kab	Belum Menyusun		Sudah Menyusun	Sedang Menyusun (Menganggarkan TA 2019)		Review		Proses Legalisasi		
	Belum Menganggarkan	Akan Menganggarkan Tahun...	Tahun Penyusunan	Profil RP3KP	Analisis atau Buku Rencana	Penyempurnaan RP3KP/RP4D	Review Perda RP3KP	Penyusunan Naskah Akademis RP3KP	Konsultasi Publik / Prolegda	Legalisasi Menjadi Perda
Provinsi Sumatera Barat			Th. 2016							Th. 2016
Kabupaten Kepulauan Mentawai			Th. 2016					Th. 2016		
Kabupaten Pesisir Selatan			Th. 2018					Th. 2018		
Kabupaten Solok			Th. 2016			Th. 2016		Th. 2017		
Kabupaten Sijunjung	Belum			2019	2019			2019		
Kabupaten Tanah Datar			Th. 2018					Th. 2018		
Kabupaten Padang Pariaman	Belum	Th. 2020								
Kabupaten Agam		Th. 2020	2014							
Kabupaten Lima Puluh Kota			Th. 2018					Th. 2018		Th. 2019
Kabupaten Pasaman	Belum	Th. 2020								
Kabupaten Solok Selatan	Belum	Th. 2020								
Kabupaten Dharmasraya	Belum	Th. 2020								
Kabupaten Pasaman Barat			Th. 2017					Th. 2017		
Kota Padang			Th. 2016			Th. 2020		Th. 2016		
Kota Solok			Th. 2016					Th. 2016		
Kota Sawahlunto			Th. 2016 (RP4D)			Th. 2019				Th. 2019
Kota Padang Panjang						Th. 2019		Th. 2016		
Kota Bukittinggi			Th. 2016 (RP4D)					Th. 2016		
Kota Payakumbuh			Th. 2018							
Kota Pariaman			Tahun 2018					2019		Th. 2019

Sumber : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, 2019

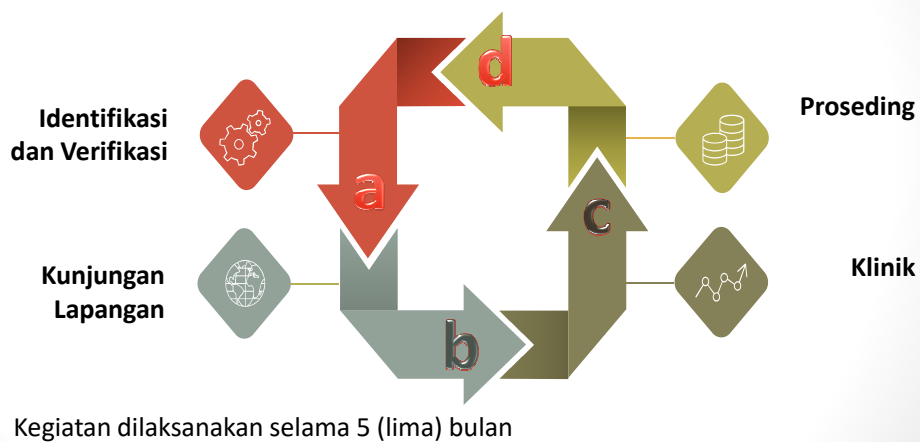
Dasar pemilihan 6 Kabupaten Kota yang didampingi

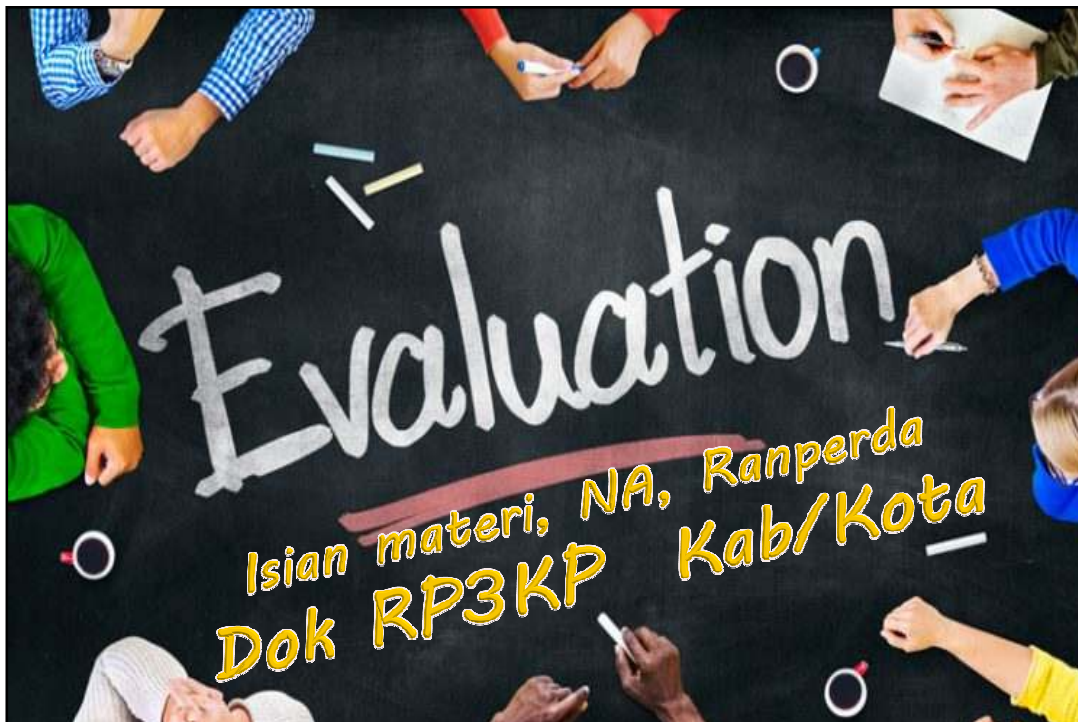
:

“menyatakan minat untuk dilakukan pendampingan terhadap Dokumen teknis, Naskah Akademik, ranperda RP3KP yang sudah/akan/sedang disusun



2. Metodologi pendampingan penyusunan Dokumen RP3KP Ke kab/kota





**SANDINGAN CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014 DENGAN PERUNDANGAN YANG
AKAN DISYAHKAN**

Bab	CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014	CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP/KOTA BERDASARKAN K PERUNDANGAN YANG AKAN DISYAHKAN
BAB I	KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROFIL PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB II	PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANALISIS RP3KP KOTA /KABUPATEN
BAB III	ANALISIS	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM RP3KP KABUPATEN

Perubahan Substansi materi
pada perundang-undangan
yang akan disyahkan
memiliki penjabaran analisis
yang berbeda pada

- ✓ Kota : Analisis
pembangunan
Lingkungan hunian baru
kota
- ✓ Kab : Analisis lingkungan
hunian pedesaan



KOTA PARIAMAN



Hasil kunjungan

1. Kota Pariaman Sudah menyusun Dokumen RP3KP, dan Ranperda
2. Kota Pariaman belum ada Naskah Akademik RP3KP

Evaluasi

1. Kota Pariaman harus segera menyusun Naskah Akademik RP3KP, karena amanat UU No 11 No 12 , Naskah
2. Akademik sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang

Solusi

1. Kota Pariaman harus segera menyusun Naskah Akademik RP3KP dan menyiapkan personil untuk penyiapan Naskah akademik Yang dimaksud
2. Konsultan pendamping akan melakukan kunjungan ke daerah

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Hasil kunjungan

1. Kabupaten Pessel Sudah menyusun Dokumen RP3KP,
2. Kab Pessel belum ada Naskah Akademik RP3KP dan Ranperda
3. Kab pessel menjadikan Dok RP3KP sampai perbup

Evaluasi

1. Kab Pessel segera menyusun Naskah Akademik RP3KP, karena amanat UU No 11 No 12 , Naskah Akademik sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang
2. Akademik sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang

Solusi

1. Kab Pessel segera menyusun Naskah Akademik dan perbup
2. Konsultan pendamping akan melakukan kunjungan ke daerah

KABUPATEN SIJUNJUNG



Hasil kunjungan

1. Kabupaten Sijunjung Baru menyusun Dokumen RP3KP,
2. Kegiatan RP3KP diserahkan kepada Pihak 3

Evaluasi

1. Kab Sijunjung melakukan koordinasi kepada provinsi pada setiap proses pelaksanaan kegiatannya
2. Kabupaten Sijunjung menyerahkan rencana kerja yang akan disusun selama proses penyusunan RP3KP di Kabupaten Sijunjung

Solusi

1. Kab Sijunjung akan melakukan koordinasi secara berkala ke provinsi
2. Konsultan pendamping akan melakukan kunjungan ke daerah

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Hasil kunjungan

1. Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Dokumen RP3KP,
2. Sudah memiliki Naskah akademik
3. Sedang proses prolegda

Evaluasi

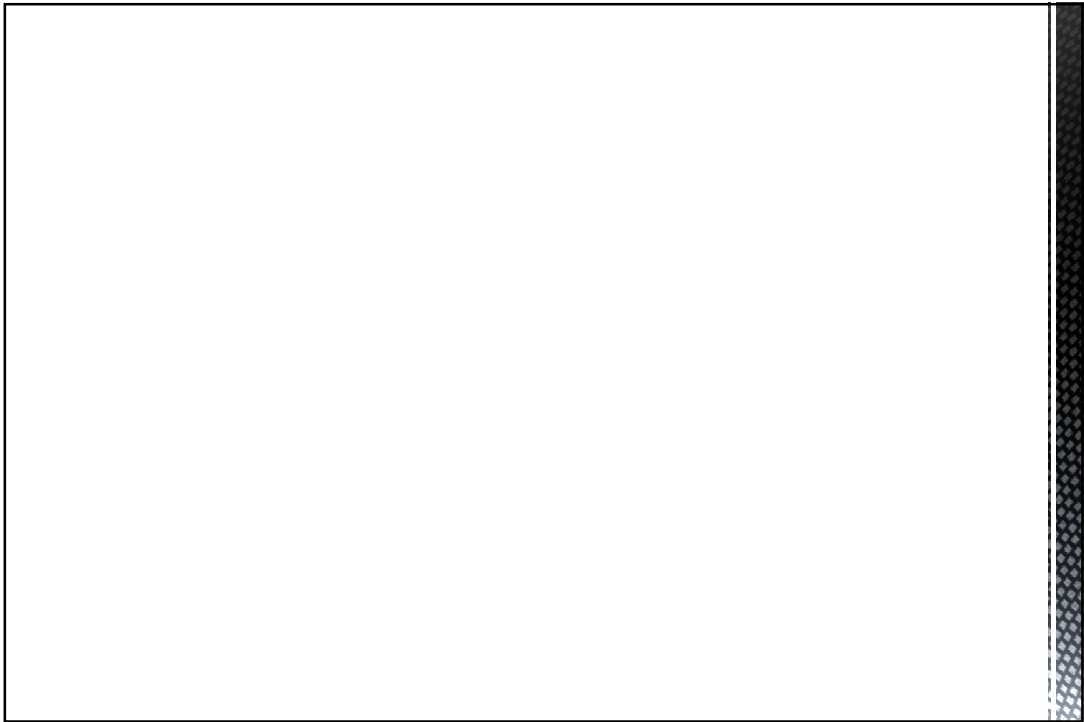
1. Subtansi muatan dokumen RP3KP belum sesuai
2. Isian Ranperda RP3KP Lima Puluh Kota perlu perbaikan terdapat perubahan tupoksi batang tubuh

Solusi

1. Kab Lima Puluh Kota akan melakukan koordinasi secara berkala ke provinsi
2. Konsultan pendamping akan melakukan kunjungan ke daerah

Klinik

1. Desk hasil muatan Dokumen Teknis, Naskah Akademik dan Ranperda RP3KP yang telah disusun oleh Kabupaten /Kota
2. Rencana jadwal kegiatan Penyusunan RP3KP yang telah disusun oleh Kabupaten/kota
3. Desk hasil muatan RP3KP yang telah disusun oleh Kabupaten /Kota



CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTABERDASARKAN MODUL DAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014	
Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Kebijakan Umum	
Kebijakan tata ruang kabupaten/kota terhadap perumahan dan kawasan permukiman	
Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota	

BAB I
➔
BAB III

1. Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	
1.1. Kebijakan perumahan dan kawasan permukiman	
1.1.1. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan	
1.1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
1.1.3. Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	
1.1.4. Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	
1.1.5. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
1.1.6. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya	
1.2. Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.1. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan	
1.2.1.1. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR	
1.2.1.2. Penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	
1.2.1.3. Keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi	
1.2.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	
1.2.2.1. Pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan perumahan antar pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat	
1.2.2.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang perumahan	
1.2.3. Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.3.1. Bank tanah dan konsolidasi lahan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.3.2. Insentif dan disinsentif	
1.2.3.3. Kemitraan antar perumahan dan kawasan permukiman dan/atau antar kabupaten/kabupaten pada lokasi-lokasi yang terbatas	
1.2.4. Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.4.1. Sinkronisasi pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.4.2. Insentif dan disinsentif	
1.2.4.3. Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat	
1.2.4.4. Kelembagaan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi	
1.2.5. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
1.2.5.1. Pengawasan dan pengendalian	
1.2.5.2. Pemberdayaan masyarakat	
1.2.5.3. Pola penanganan perumahan kumuh dan kawasan kumuh	
1.2.6. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya	
1.2.6.1. Peningkatan peran entitas keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan	
1.2.6.2. Pelibatan komunitas setempat sebagai pemantau atau pengontrol pembangunan di wilayahnya	

BAB II ➔

CAKUPAN MUATAN DOKUMEN RP3KP KABUPATEN/KOTABERDASARKAN MODUL DAN KEMENPERA NO 12 TAHUN 2014	
II. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.1. Profil Umum Kabupaten	
2.1.1. Letak geografis dan administrasi	
2.1.2. Kondisi fisik topografi, geologi dan morfologi	
2.1.3. Kondisi hidrologi	
2.1.4. Penggunaan lahan	
2.1.5. Kondisi potensi bencana alam	
2.1.6. Kondisi kependudukan	
2.1.7. Kondisi sosial dan budaya	
2.1.8. Kondisi ekonomi	
2.1.9. Potensi Sumber Daya Alam	
2.1.10. Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	
2.2. Profil perumahan dan kawasan permukiman	
2.2.1. Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota	
a. Sebaran rumah, perumahan, dan permukiman setiap kecamatan/delurahan/desa; b. Kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap kecamatan/desa; c. Budaya bermukim yang menjadi karakteristik perumahan dan permukiman; d. Jumlah dan sebaran backlog rumah setiap kecamatan; e. Jumlah dan sebaran rumah tidak layak huni setiap kecamatan	
2.2.2. Negatif list perumahan kabupaten/kota	
a. Sempadan sungai, pantai, danau, dan rel kereta api; c. Kawasan lindung; d. Kawasan rawan bencana	
2.2.3. Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
2.2.4. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
2.2.5. Kondisi perumahan	
a. Penurunan kualitas fungsi perumahan sebagai tempat hunian; b. Ketidakteraturan bangunan; c. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan d. Kualitas bangunan	
2.2.6. Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum	
a. Jalan lingkungan; b. Penyediaan air minum; c. Drainase lingkungan; d. Pengelolaan air limbah; e. Pengelolaan persampahan; dan f. Proteksi kebakaran	
2.2.7. Kondisi eksisting prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	
Prasarana jalan perumahan, Sistem drainase perumahan, Sistem penyediaan air minum, Sistem pengelolaan persampahan, Sistem pengelolaan air limbah; Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi; Sarana umum dan sosial yang menunjang fungsi hunian	
2.2.8. Kemampuan keuangan daerah, Penerimaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	
2.2.9. Kelembagaan	

BAB I

MUATAN RP3KP BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DISYAHKAN	
1. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.1. Profil Umum Kabupaten	
1.1.1. Letak geografis dan administrasi	
1.1.2. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	
1.1.3. Kondisi fisik geologi dan morfologi	
1.1.4. Kondisi kependudukan	
1.1.5. Kebijakan tata ruang kabupaten terhadap perumahan dan kawasan permukiman	
1.1.6. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten	
1.2. Profil perumahan dan kawasan permukiman	
1.2.1. Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten	
1.2.1.1. Sebaran rumah, perumahan, dan permukiman setiap kecamatan	
1.2.1.2. Pengawasan bangunan tempat tinggal setiap kecamatan	
1.2.1.3. Budaya bermukim	
1.2.1.4. Jumlah dan sebaran backlog rumah setiap kecamatan	
1.2.1.5. Jumlah dan sebaran rumah tidak layak huni setiap kecamatan	
1.2.2. Negatif list perumahan kabupaten	
1.2.2.1. Sempadan sungai, pantai, danau, dan rel kereta api	
1.2.2.2. Di bawah SUTET	
1.2.2.3. Kawasan lindung	
1.2.2.4. Kawasan rawan bencana	
1.2.3. Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
1.2.3.1. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
A. di atas air; B. di tepi air; C. di dataran rendah; D di perbukitan; dan/atau, E di daerah rawan bencana	
1.2.3.2. Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
A. Penurunan kualitas fungsi perumahan sebagai tempat hunian; B. Ketidakteraturan bangunan; C. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan D.kualitas bangunan	
1.2.3.3. Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum	
A. Jalan lingkungan; B. Penyediaan air minum; C. Drainase lingkungan; D. Pengelolaan air limbah; E. Pengelolaan persampahan; dan F. Proteksi kebakaran	
1.2.4. Kondisi eksisting prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	
1.2.4.1. Prasarana jalan perumahan	
1.2.4.2. Sistem drainase perumahan	
1.2.4.3. Sistem penyediaan air minum	
1.2.4.4. Sistem pengelolaan persampahan	
1.2.4.5. Sistem pengelolaan air limbah	
1.2.4.6. Sarana umum yang menunjang fungsi hunian	
1.2.4.7. Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi	

III	Analisis
3.1.	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota
3.2.	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
3.3.	Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan
3.4.	Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota
3.5.	Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman,
3.6.	Analisis arah pengembangan PKP di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten/kota terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan
3.7.	Analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota
3.8.	Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana dan sarana serta utilitas umum
3.9.	Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah
3.10.	Analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang
3.11.	Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang
3.12.	Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah
3.13.	Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota

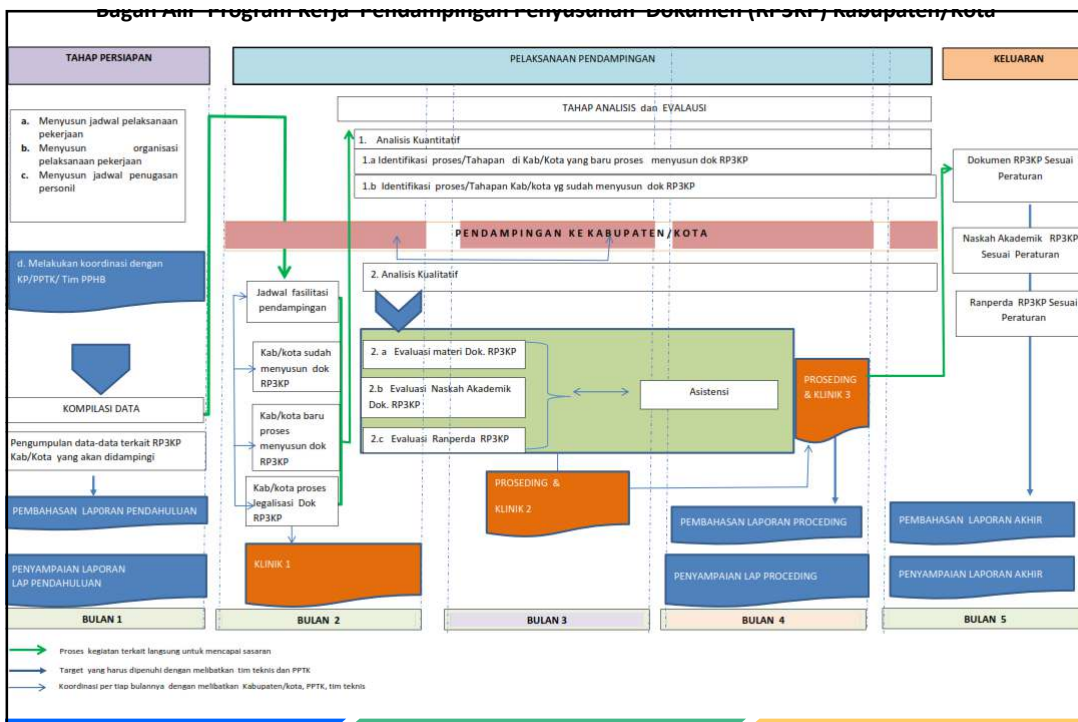
MUATAN RPSPK BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIBYAKAN	
1.	Analisis RPSPK Kabupaten
1.1.	Analisis umum
1.1.1.	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten
1.1.2.	Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
1.1.3.	Analisis karakteristik sosial kependudukan dan ekonomi
1.1.3.1.	Struktur penduduk setiap kecamatan berdasarkan mata pencaharian, kelompok umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan di perkotaan dan perdesaan
1.1.3.2.	Perhitungan jumlah kepala keluarga tiap kecamatan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan di perkotaan dan perdesaan
1.1.3.3.	Sebaran kepadatan penduduk tiap kecamatan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan di perkotaan dan perdesaan
1.1.3.4.	Jumlah penduduk kabupaten pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan di perkotaan dan perdesaan
1.1.4.	Analisis karakteristik budaya bermukim masyarakat
1.1.4.1.	Potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman
1.1.4.2.	Kebutuhan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya
1.1.4.3.	Kebutuhan pengembangan lingkungan hunian
1.1.4.4.	Kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum
1.2.	Analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan kabupaten (RPSP)
1.2.1.	Analisis kebutuhan rumah tinggal dan proyek
1.2.2.	Analisis kebutuhan pembangunan baru
1.2.3.	Analisis kebutuhan pembangunan kembali
1.2.4.	Analisis kebutuhan peningkatan kualitas rumah
A.	Perumahan
B.	Perumahan
C.	Perumahan
1.2.5.	Analisis kebutuhan bangunan rumah setiap kecamatan
1.2.6.	Analisis kebutuhan PSU perumahan
A.	Prasarana jalan perumahan
B.	Sistem pengelolaan limbah perumahan
C.	Sistem penyediaan air minum perumahan
D.	Sistem pengelolaan persampahan perumahan
E.	Sistem pengelolaan air limbah perumahan
F.	Sarana umum yang menunjang fungsi hunian
G.	Jaringan tenaga listrik di perumahan
H.	Jaringan telekomunikasi di perumahan
1.2.7.	Analisis kondisi dasar perumahan eksisting
1.2.8.	Analisis peryediaan perumahan layak
1.2.9.	Analisis lokasi perumahan yang berada di area negative list
1.2.10.	Analisis permintaan masyarakat terhadap rumah (demand)
1.2.11.	Analisis realisasi pembangunan perumahan berdasarkan (on supply)
1.2.12.	Analisis daya beli masyarakat (ketertarikan)
1.2.13.	Analisis kebutuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten
A.	Jenis pelayanan dasar
B.	Mutu pelayanan dasar
C.	Perencanaan pelayanan dasar
1.2.14.	Analisis kebutuhan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak bencana

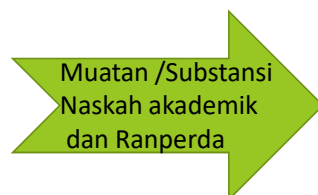
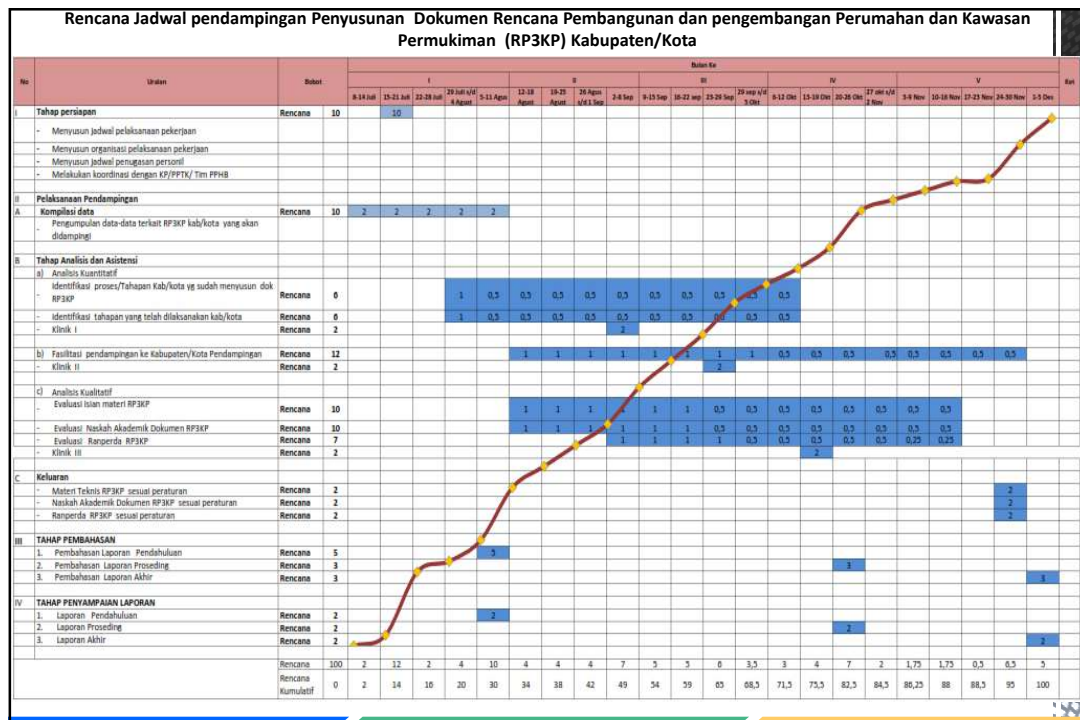
BAB III → BAB II

1.1.	Analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
1.1.1.	Analisis lingkungan hunian perkotaan
1.1.1.1.	Analisis pengembangan lingkungan hunian perkotaan dalam mendukung fungsi dan peranan perkotaan di kabupaten
A.	Analisis potensi lingkungan hunian perkotaan dalam mendukung fungsi dan peranan perkotaan di kabupaten yang memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal manusia
i.	Analisis kebijakan peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dalam mendukung fungsi dan peranan perkotaan di kabupaten yang memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal manusia
ii.	Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan sesuai alokasi rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
iii.	Analisis pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang ada
iv.	Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan sesuai alokasi rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
C.	Analisis kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang ada
i.	Analisis kinerja kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang ada
ii.	Analisis keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan di kabupaten sesuai rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
iii.	Analisis kebutuhan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan
D.	Analisis kebutuhan peningkatan kualitas permukiman rumah
E.	Analisis pencegahan terhadap timbulnya permukiman kumuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak layak huni
i.	Analisis pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi tidak layak huni
ii.	Analisis pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak layak huni dan tidak teratur
1.1.1.2.	Analisis pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan
A.	Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba
i.	Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii.	Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
iii.	Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pelayanan jasa pemerintahan
B.	Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
i.	Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii.	Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
iii.	Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pelayanan jasa pemerintahan
1.1.1.3.	Analisis pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan
A.	Rehabilitasi
B.	Rekonstruksi
C.	Peremajaan

Analisis pengembangan lingkungan hunian perdesaan
A. Analisis potensi lingkungan hunian perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesaan di kabupaten
i. Analisis kebijakan peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesaan di kabupaten yang memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal manusia
B. Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perdesaan sesuai alokasi rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
i. Analisis pelayanan lingkungan hunian perdesaan yang ada
ii. Analisis kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perdesaan sesuai alokasi rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
iii. Analisis kebutuhan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan
C. Analisis kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan yang ada
i. Analisis kinerja kapasitas prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan yang ada
ii. Analisis keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan di kabupaten sesuai rencana tata ruang kabupaten dan standar teknis
iii. Analisis kebutuhan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perdesaan
D. Analisis bagian lingkungan hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangan
Analisis lingkungan hunian baru perdesaan
A. Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba
i. Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii. Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
iii. Analisis Kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pelayanan jasa pemerintahan
B. Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
i. Analisis kebutuhan penyediaan lokasi permukiman
ii. Analisis kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
iii. Analisis kebutuhan lokasi pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan pelayanan jasa pemerintahan

1. Tahap Persiapan	
a. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan	
b. Menyusun organisasi pelaksanaan pekerjaan	
c. Menyusun jadwal penugasan personil	
d. Melakukan koordinasi dengan KP/DPTK/ Tim PPHB	
KOMPILASI DATA	
Pengumpulan data-data terkait RP3KP Kab/Kota yang akan didampingi	
PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN	
PENYAMPAIAN LAPORAN PENDAHULUAN	
BULAN 1	
2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan	
a. Tahap Analisis dan Evaluasi	
1. Analisis Kuantitatif	
1.a Identifikasi proses/Tahapan di Kab/Kota yang baru proses menyusun dok RP3KP	
1.b Identifikasi proses/Tahapan Kab/kota yg sudah menyusun dok RP3KP	
2. Analisis Kualitatif	
2.a Evaluasi materi Dok, RP3KP	
2.b Evaluasi Naskah Akademik Dok, RP3KP	
2.c Evaluasi Ranperda RP3KP	
Asistensi	
PROSEDING & KLINIK 1	
PROSEDING & KLINIK 2	
PROSEDING & KLINIK 3	
BULAN 2	
BULAN 3	
BULAN 4	
BULAN 5	
3. Tahap Keluaran	
Dokumen RP3KP Sesuai Peraturan	
Naskah Akademik RP3KP Sesuai Peraturan	
Ranperda RP3KP Sesuai Peraturan	
PEMBAHASAN LAPORAN PROCEEDING	
PENYAMPAIAN LAPORAN PROCEEDING	
PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR	
PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR	





I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK TERDIRI ATAS:

- A Judul
- B Kata pengantar
- C Daftar isi
 - 1. Pendahuluan
 - 2. kajian teoretis dan praktik empiris
 - 3. Evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan terkait
 - 4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota
 - 6. Bab VI penutup
- D Daftar pustaka
- E Lampiran: rancangan peraturan perundang-undangan

II. SISTEMATIKA RAPERDA TERDIRI ATAS:

- 1. JUDUL
- 2. PEMBUKAAN
 - 1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Konsiderans
 - 4) Dasar Hukum
 - 5) Diktum
- 3. BATANGTUBUH
 - 1) Ketentuan Umum
 - 2) Materi Pokok yang Diatur
 - 3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5) Ketentuan Penutup
- 4. PENUTUP
- 5. PENJELASAN (jika diperlukan)
- 6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

1. Perubahan substansi materi yang baru ini sudah menampung kegiatan, apakah akan ada perubahan

Jawab . Substansi yang disampaikan sudah

1. Pessel sudah, menyusun, kmdian sekarang ada perubahan Pessel harus bisa diubah,

1. Dokumen juga dapat disesuaikan
2. Dokumen yang lama tetap bisa dikondisikan dan didorong

1. Lima puluh kota :

Banyak perubahan di rp3KP dna sekarang disesuaikan dan dibuatkan berita Acaranya sehingga memudahkan dalam proses Berita Acara nya

Kab Dharmasraya

1. Apa yang perlu dipersiapkan dan apa strateginya

Memiliki surat edaran bagi kabupaten Dharmasraya

RTRW Kabupaten Dharmasraya sedang proses

Memiliki satu data di daerah

Upaya dalam penyusunan RP3KP

1. Agama

Apa yang mengisyaratkan bahwa rp3Kp harus disusun dan diperdakan apakah cukup diperwakokan atau diperbup kan saja, agar setiap ada perubahan memudahkan untuk diubah.

2. Agama diperlukan penyesuaian waktu, dan agama juga daftar untuk pendampingan Rp3KP.

3. Pada tahun ini, dianggarkan dan menyusun dan review dan

Jawab

1. Siapa yang akan memperbaiki hasil perbaikan Rp3KP
2. RTRW sedang pergub
3. Bagaimana langkah-langkah kab/kota

Bambang APERSI

1. Screenin awal rumah diawali dengan SLF
2. Perlu dskusi lanjutan dengan stake holder

PASAMAN

1. Surat edaran tentang penyusunan RP3KP oleh Kab Kota
2. PERTEMUAN RUTIN KADIS YANG MEMBAHAWAI URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA WAKTU YANG DITENTUKAN

Agam

1. Pokja Agam tidak jalan karena sering tidak dilibatkan.